EDISI JUMAT 30 OKTOBER 2026
HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan
TODAY



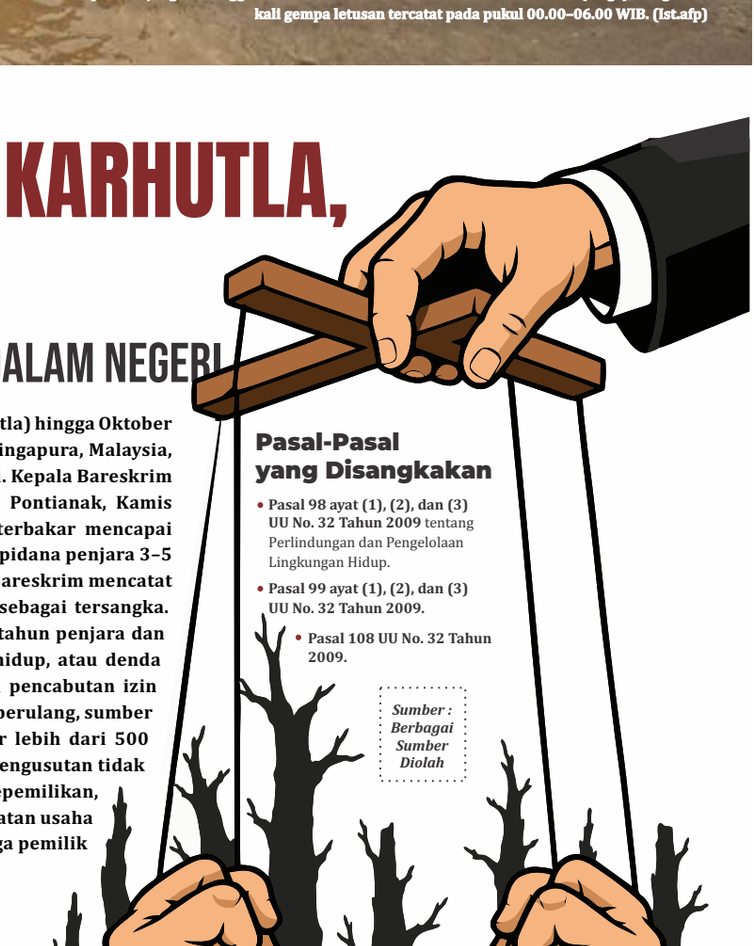
Warga Nekat Terobos Jalur Lahar Semeru

Ancaman banjir lahar hujan Gunung Semeru belum menyurutkan aktivitas warga. Sejumlah warga terlihat melintasi aliran lahar di Lumajang, Jawa Timur, Kamis (29/10/2026), di tengah peningkatan curah hujan dalam lima hari terakhir. BPBD Lumajang mengimbau masyarakat menjauhi radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan serta sektor tenggara hingga 13 kilometer dari puncak. Potensi bahaya awan panas dan lahar dapat menjangkau hingga 17 kilometer. Semeru masih berstatus Level III (Siaga), dengan 29 kali gempa letusan tercatat pada pukul 00.00–06.00 WIB. (Ist.afp)

20 KORPORASI TERSANGKA KARHUTLA, SIAPA PENGENDALINYA?

4 PERUSAHAAN MILIK ASING, 16 LAINNYA PEMODAL DALAM NEGERI

Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga Oktober 2026. Empat di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Sedangkan 16 lainnya merupakan perusahaan bermodal dalam negeri. Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tersebut di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (29/10/2026). Dalam perkara korporasi, polisi menangani 104 laporan dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare. Perusahaan yang disangka melanggar ketentuan lingkungan hidup terancam pidana penjara 3–5 tahun dan denda Rp3 miliar hingga Rp15 miliar. Pengusutan juga menyasar pelaku perorangan. Bareskrim mencatat 287 laporan polisi dengan luas lahan terbakar 5.859,12 hektare dan menetapkan 245 orang sebagai tersangka. Bergantung pada perbuatan dan pasal yang diterapkan, mereka terancam hukuman hingga 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar berdasarkan ketentuan di bidang perkebunan dan lingkungan hidup, atau denda maksimal Rp5 miliar berdasarkan Undang-Undang Kehutanan. Polri juga merekomendasikan pencabutan izin terhadap 23 korporasi yang diduga terkait karhutla, antara lain berdasarkan temuan kebakaran berulang, sumber api dari area konsesi, sarana pengendalian api yang tidak memadai, dan luas lahan terbakar lebih dari 500 hektare.Penetapan tersangka mendapat dukungan dari politisi hingga pemuka agama. Namun, pengusutan tidak cukup berhenti pada badan usaha dan pelaku lapangan. Penyidik perlu menelusuri struktur kepemilikan, pengendali operasional, pemberi perintah, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha terkait. Kementerian Kehutanan juga menyatakan tengah menelusuri pertanggungjawaban hingga pemilik manfaat akhir (beneficial owner). **BERITA SELENGKAPNYA DI HAL11.....**



Pasal-Pasal yang Disangkakan

- **Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- **Pasal 99 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 32 Tahun 2009.**
- **Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009.**

Sumber : Berbagai Sumber Diolah

4 Perusahaan Bermodal Asing

- **PT HKI** — Singapura
- **PT AI**— Singapura
- **PT RKA** —Malaysia.
- **PT API** — Korea Selatan

16 Perusahaan Bermodal Dalam Negeri

• PT BOS	• PT SAE	• PT BPK	• PT BPK
• PT AER	• PT BSLT	• PT PW	• PT PW
• PT SKM	• PT CGUK	• PT BWL	• PT BWL
• PT WLJ	• PT FSL	• PT MIB	• PT MIB

Total luas konsesi: **380.116 hektare.**

Luas lahan terbakar yang dikaitkan dengan 20 perusahaan: 19.536 hektare.

ANCAMAN PIDANA

- Penjara: **3–5 tahun.**
- Denda: **Rp3 miliar Sampai Rp15 miliar.**

02 GOVERMENTTODAY
Hashim Ramal Dolar Tembus Rp22.000, BI Bersikukuh Fundamental Ekonomi Terjaga

05 NUSANTARA
Denny Indrayana Walk Out dari Sidang Gugatan SK Penyetaraan Ijazah Gibran

10 LISTSTYLE
Sac Actun, Labirin Bawah Air Meksiko Simpan Jejak Peradaban Maya

HASHIM RAMAL DOLAR TEMBUS RP22.000, BI BERSIKUKUH FUNDAMENTAL EKONOMI TERJAGA

Peringatan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, mengenai potensi pelemahan rupiah hingga Rp22.000 per dolar Amerika Serikat (AS) menambah perhatian terhadap rencana peninjauan status pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). Hashim menilai, kemungkinan keluarnya investor asing dari pasar saham domestik dapat menekan nilai tukar sekaligus memperberat pembayaran utang luar negeri. Namun, proyeksi tersebut merupakan skenario risiko, bukan kepastian bahwa rupiah akan mencapai level tersebut.Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyatakan fundamental ekonomi Indonesia masih relatif terjaga dibandingkan negara-negara pembanding

Polemik ini mengemuka setelah MSCI membuka konsultasi mengenai kemungkinan menurunkan klasifikasi pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Isu tersebut berkaitan dengan persoalan transparansi kepemilikan saham, ketersediaan saham yang dapat diperdagangkan publik (free float), serta integritas pembentukan harga.

Jika penilaian tersebut berujung pada penurunan status, Indonesia berisiko kehilangan sebagian daya tariknya bagi investor institusional yang menggunakan indeks global sebagai acuan investasi.

Dalam sambutannya pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026), Hashim memperingatkan bahwa keluarnya investasi asing dari bursa saham Indonesia berpotensi menambah tekanan terhadap rupiah.

"Kalau investasi luar negeri keluar dari bursa saham kita, rupiah bisa semakin lemah. Saya sudah hitung bisa Rp20.000 sampai Rp21.000. Ada yang bilang Rp22.000," kata Hashim.

Ia mengaku pernah mendiskusikan kemungkinan tersebut dengan CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani. Menurut Hashim, jika skenario pelemahan itu terjadi, dampaknya tidak berhenti pada pasar saham.

"Saya pernah diskusi sama Pak Rosan (CEO BPI Danantara), kalau itu terjadi rupiah bisa Rp21.000-Rp22.000, pinjaman luar negeri kita harus kita bayar lebih mahal, ini bisa jadi bencana dan malapetaka bagi ekonomi Indonesia," ujarnya.

Pelemahan rupiah memang dapat meningkatkan nilai pembayaran pokok dan bunga utang berdenominasi valuta asing ketika dihitung dalam rupiah. Perusahaan yang memiliki kewajiban dolar AS tetapi memperoleh pendapatan dalam rupiah juga dapat menghadapi kenaikan beban pembayaran.

Dampak akhirnya bergantung pada besarnya eksposur valuta asing, ketersediaan pendapatan dalam mata uang yang sama, serta strategi lindung nilai masing-masing debitur.



Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo

BI: Dipengaruhi Banyak Faktor

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Destry mengatakan pergerakan rupiah tidipengaruhidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling memengaruhi. Ia menilai kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih relatif baik dibandingkan negara-negara lain yang menjadi pembanding.

"Jadi kalau kita lihat pergerakan rupiah kan memang sangat banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi kalau kita lihat dari fundamental ekonomi kita, sebenarnya kita dalam kondisi yang relatif yang oke dibandingkan dengan peer group kita," ujar Destry kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Menurut Destry, nilai tukar bergerak mengikuti dinamika pasar, termasuk keseimbangan permintaan dan penawaran serta persepsi pelaku pasar. Sentimen internasional juga dapat mengubah arah pergerakan rupiah dalam waktu relatif singkat.

Ia mencontohkan respons pasar setelah keputusan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), untuk tidak menaikkan suku bunga. Keputusan tersebut, menurut Destry, memberikan sentimen positif bagi pasar global.

"Kalau kita lihat hari ini juga penguatan terjadi di global, 'Oh Amerika nggak naikkan suku bunga The Fed', dampaknya ternyata langsung positif. Jadi banyak faktor yang di luar kontrol dari kita," jelasnya.

Destry menegaskan, prioritas BI adalah menjaga stabilitas ekonomi, terutama nilai tukar. Stabilitas diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif agar sektor riil dapat berkembang dan membuka lapangan kerja.(gus,ist,kum/dya)

Industri Ekspor Diuntungkan, Bahan Baku Impor Tertekan

NILAI tukar rupiah menguat pada penutupan perdagangan Kamis (29/10/2026), tetapi masih bertahan di atas Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Kondisi ini membawa dampak berbeda bagi industri dalam negeri. Industri berorientasi ekspor berpeluang menikmati pendapatan rupiah lebih besar dari penjualan dalam dolar, sedangkan industri yang bergantung pada bahan baku impor menghadapi potensi kenaikan biaya produksi.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, penguatan dolar AS terhadap rupiah tidak sepenuhnya merugikan sektor industri. Dampaknya bergantung pada struktur biaya dan sumber pendapatan masing-masing perusahaan. Industri yang memperoleh pemasukan dalam dolar cenderung diuntungkan, sementara perusahaan yang harus membeli bahan baku dari luar negeri perlu menyiapkan langkah mitigasi.

"Kalau industri-industri yang orientasinya ekspor itu pasti senang, karena dengan barang yang sama mendapatkan rupiah yang lebih besar. Karena harga dolarnya naik, dibeli dengan dolar di luar negeri," kata Sarmuji di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).

Sebaliknya, perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor menghadapi tekanan ketika rupiah melemah. Dengan nilai tukar yang lebih tinggi, kebutuhan rupiah untuk membayar bahan baku, komponen, atau mesin berdenominasi dolar dapat meningkat.

Kenaikan tersebut berpotensi memperbesar biaya produksi, terutama bagi perusahaan yang sulit menaikkan harga jual atau tidak memiliki lindung nilai valuta asing.

"Tetapi untuk industri yang bahan bakunya dari luar negeri, dari impor, tentu agak berat. Jadi, harus ada mitigasi bagi industri. Industri juga harus melakukan prediksi penyesuaian diri juga," ujar Sarmuji.

Ia berharap pergerakan dolar AS terhadap rupiah lebih stabil agar pelaku usaha dapat menyusun perencanaan produksi secara lebih terukur.

"Tapi kita harapkan tentu dolar lebih stabil, sehingga industri lebih mudah untuk memproyeksikan proses produksinya," tuturnya.

Berdasarkan data, rupiah ditutup menguat 46 poin atau 0,15 persen ke level Rp18.137 per dolar AS, dibandingkan penutupan hari sebelumnya di Rp18.184 per dolar AS. Data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia juga menunjukkan penguatan rupiah ke Rp18.128 per dolar AS dari Rp18.183 pada hari sebelumnya. Sementara itu, Yahoo Finance mencatat rupiah naik 58 poin atau sekitar 0,32 persen ke Rp18.125 per dolar AS.

Penguatan tersebut memberi sedikit ruang bagi pelaku industri setelah rupiah bergerak mendekati Rp18.200 per dolar AS pada perdagangan Rabu (28/10). Namun, perbaikan harian tidak serta-merta menghilangkan tekanan yang ditimbulkan oleh tingginya biaya impor. Perusahaan tetap perlu memperhitungkan risiko perubahan kurs dalam pengadaan bahan baku, penentuan harga, dan perencanaan arus kas.(tin,ist/dya)

TARIK ULUR PANSEL KPU: BERALASAN TUNGGU UU PEMILU

Pembentukan panitia seleksi (pansel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2027–2032 belum diumumkan pemerintah hingga Kamis (29/10/2026). Padahal, tenggat pembentukan tim seleksi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah terlewati sejak 12 Oktober 2026. Di tengah keterlambatan itu, muncul perbedaan pandangan antara Komisi II DPR RI yang menyarankan pembentukan pansel menunggu pengesahan UU Pemilu baru dan pihak yang mendesak pemerintah segera menjalankan aturan yang masih berlaku.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai pembentukan pansel sebaiknya menunggu revisi UU Pemilu disahkan. Menurut dia, langkah tersebut menjadi skenario paling aman agar proses seleksi calon penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan yang akan digunakan dalam Pemilu 2029.

"Skenario paling aman adalah pembentukan pansel setelah undang-undang baru disahkan," ujar Rifqinizamy dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).

Rifqinizamy menjelaskan, materi ujian dan kriteria seleksi calon anggota KPU maupun Bawaslu perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Pemilu yang baru. Sebab, aturan hasil revisi tersebut nantinya menjadi pedoman bagi kedua lembaga dalam menjalankan tugas menyelenggarakan dan mengawasi Pemilu 2029. Jika proses seleksi berlangsung sebelum regulasi baru disahkan, dikhawatirkan terdapat ketidaksesuaian antara kriteria seleksi dan ketentuan yang akhirnya berlaku.

"Materi seleksi akan mengacu kepada ketentuan undang-undang pemilu yang baru yang akan menjadi rujukan bagi para penyelenggara pemilu baik di KPU maupun Bawaslu dalam mereka bekerja menjalankan Pemilu 2029 yang akan datang," kata dia.

Menurut Rifqinizamy, revisi UU Pemilu juga berpotensi mengubah masa tahapan serta mekanisme perekrutan anggota KPU dan Bawaslu. Karena itu, ia menilai perdebatan mengenai waktu pembentukan pansel tidak bisa dilepaskan dari kepastian aturan baru, termasuk durasi tahapan seleksi dan proses uji kelayakan serta kepatutan di DPR.

"Perdebatan soal waktu menjadi tidak relevan lagi karena di undang-undang baru kita belum tahu nanti berapa lama masa tahapan, termasuk bagaimana mandatori berapa lama kemudian proses seleksi itu akan dilakukan oleh pansel dan DPR berdasarkan ketentuan undang-undang pemilu yang baru," jelasnya.

Meski demikian, Rifqinizamy memastikan Komisi II DPR siap menjalankan kewenangannya dalam proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Komisi II, kata dia, akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sesuai ketentuan perundang-undangan ketika tahapan tersebut tiba. Sebelumnya, pada 27 Oktober, Rifqinizamy juga menyatakan Komisi II belum berkomunikasi ataupun menerima penjelasan pemerintah mengenai pembentukan pansel. Ia menyebut DPR masih berada dalam masa reses dan menghormati kewenangan pemerintah dalam menentukan tim seleksi.



Personel kepolisian melakukan pengamanan di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta. (Dok.ist)

"Komisi II DPR RI pada prinsipnya siap menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada waktunya nanti," pungkasnya.

Pakar Ingatkan Risiko Pemilu 2029

Pandangan Rifqinizamy berhadapan dengan kritik pakar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Ia menilai belum dibentuknya pansel sesuai tenggat merupakan pelanggaran terhadap UU Pemilu yang berlaku dan dapat menjadi preseden buruk bagi persiapan Pemilu 2029.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (8) UU Nomor 7 Tahun 2017, tim seleksi calon anggota KPU harus dibentuk paling lama enam bulan sebelum masa jabatan anggota KPU berakhir. Ketentuan serupa mengenai seleksi anggota Bawaslu diatur dalam Pasal 118. Masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022–2027 akan berakhir pada 12 April 2027. Dengan demikian, tenggat enam bulan sebelumnya jatuh pada 12 Oktober 2026.

"Tidak dibentuknya panitia seleksi oleh Presiden itu adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara eksplisit menyebutkan panitia seleksi atau tim seleksi calon anggota KPU-Bawaslu harus dibentuk paling lama enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan KPU-Bawaslu," kata Titi.

Titi menilai keterlambatan tersebut dapat memunculkan persepsi bahwa pemerintah tidak memiliki iktikad baik untuk mematuhi aturan pemilu. Jika persoalan kepatuhan sudah muncul pada tahap awal persiapan, ia khawatir kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2029 ikut terganggu.

"Pelanggaran ini adalah preseden buruk dan bisa menimbulkan ketidakpercayaan pada persiapan Pemilu 2029," ujarnya.

Ia menegaskan, penundaan pembentukan pansel semestinya tidak dilakukan hanya dengan alasan revisi undang-undang masih berjalan. Jika pemerintah dan DPR ingin mengubah tenggat yang telah diatur, perubahan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas.

"Tidak boleh kemudian tim seleksi tidak dibentuk, di saat yang sama undang-undang pemilunya masih berlaku," kata Titi.

Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan belum diumumkannya tim seleksi. Menurut Titi, keterlambatan yang tidak segera diselesaikan berpotensi memengaruhi kualitas persiapan Pemilu 2029 dan memicu ketidakpatuhan terhadap aturan main lainnya.

Ada Kabar Sudah Terbentuk

Persoalan pembentukan pansel turut menimbulkan pertanyaan mengenai status tim yang akan menyeleksi calon komisioner tersebut. Ketua Kelompok Fraksi PKS Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, pada 22 Oktober 2026 menyebut pansel calon anggota KPU periode 2027–2032 sebenarnya sudah terbentuk dan tinggal diumumkan Presiden Prabowo Subianto.

Mardani mengaku memperoleh informasi itu setelah berkomunikasi dengan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri serta Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

"Mestinya 12 Oktober 2026 sudah dibentuk Pansel. Saya sudah komunikasi dengan Dirjen Polpum. Dirjen Polpum sudah mengirimkan surat ke Presiden, kemudian saya kontak Wakil Ketua DPR Pak Dasco, (katanya) sudah jadi," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Meski demikian, Mardani saat itu mengaku belum mengetahui nama-nama anggota pansel maupun kepastian waktu pengumumannya. Hingga 29 Oktober, Kompas.com melaporkan pemerintah belum mengumumkan pansel secara resmi. Dengan demikian, informasi bahwa tim telah terbentuk belum menjawab kepastian mengenai pengumuman resmi dan tahapan kerja seleksi berikutnya.(tin ist,dtc/dya)

FAKTA MOLORNYA PANSEL

- **12 Oktober 2026**
  Batas waktu pembentukan Pansel KPU-Bawaslu, enam bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- **12 April 2027**
  Masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu periode berjalan berakhir.
- **11 orang anggota Pansel**
  Terdiri atas 3 unsur pemerintah, 4 akademisi, dan 4 unsur masyarakat.
- **14 nama calon**
  Jumlah calon anggota KPU dan Bawaslu yang diserahkan Pansel kepada Presiden.

APA TUGAS PANSEL?

- Membuka pendaftaran calon.
- Memeriksa kelengkapan administrasi.
- Menggelar tes tertulis dan psikologi.
- Membuka ruang masukan masyarakat.
- Melakukan tes kesehatan dan wawancara.
- Memilih 14 calon melalui rapat pleno.
- Menyerahkan nama calon kepada Presiden



HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan TODAY

Sidang Perdana Pemerasan WNA di Imigrasi

MENCUAT KODE RAMA UNTUK MENTERI, DIJATAH RP40 JUTA/MINGGU

Uang pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi diduga mengalir hingga ke mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim. Jaksa mengungkap, Silmy meminta setoran Rp100 juta setiap bulan kepada anak buahnya. Dalam catatan pembagian uang, jatah untuk Silmy disebut menggunakan kode "malaikat". Jaksa penuntut umum juga mengungkap kode RAMA. Kode tersebut disebut merujuk pada Menteri dengan jatah setoran mencapai Rp40 juta setiap minggu.

Isi dakwaan JPU KPK terhadap Silmy Karim pada sidang 29 Oktober 2026:

Dakwaan Pemerasan Sistemis (Rp168,92 Miliar)

- **Modus "Uang Klik":** Memanipulasi sistem digital untuk menolak/memperlambat izin tinggal (ITK/ITAS/ITAP) WNA guna memeras biaya tambahan tidak resmi.
- **Jatah Pribadi:** Menerima aliran langsung sebesar Rp1,2 miliar (disetor bertahap Rp100 juta/bulan).
- **Dana Kuliah:** Menggunakan uang pungli sebesar Rp50 juta untuk membayar biaya kuliah S3 pribadinya pada Desember 2025.
- **Kode Sandi Aliran:** Menggunakan kode "RAMA" (jatah Menteri Rp40 juta/minggu) dan "Malaikat" (dana taktis pribadi Silmy)

Dakwaan Gratifikasi (Rp33,94 Miliar)

- **Uang Tunai:** Menerima Rp2,56 miliar yang disamarkan sebagai dana operasional pimpinan periode Agustus 2025–Mei 2026
- **Kepemilikan Saham:** Menerima gratifikasi berupa aset saham di beberapa perusahaan sekuritas senilai Rp31,38 miliar.



Terdakwa mantan Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (29/10).(ist)

Kode RAMA muncul dalam uraian jaksa mengenai dugaan pembagian uang dari pungutan tidak resmi pengurusan dokumen keimigrasian. Praktik tersebut dikenal dengan istilah uang klik atau uang loket. Jaksa memaparkan adanya pembagian setoran menggunakan kode tertentu untuk membedakan penerima dan besaran uang yang dialokasikan kepada sejumlah pejabat.

"RAMAnya sebutan untuk Menteri sebesar Rp40 juta setiap minggu," demikian kutipan dakwaan yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Menurut dakwaan, uang tersebut berasal dari pengurusan dokumen keimigrasian, termasuk izin tinggal terbatas (ITAS), izin tinggal tetap (ITAP), dan permohonan alih status izin tinggal. Besaran pungutan disebut berkisar Rp700 ribu hingga Rp8 juta per permohonan, bergantung pada jenis layanan.

Dana yang terkumpul diduga dihimpun melalui rekening penampungan, termasuk rekening atas nama pihak lain atau nominee. Setelah itu, uang dicairkan secara tunai dan dibagikan berdasarkan catatan pembagian jatah yang menggunakan kode-kode khusus.

Jaksa dalam sidang perdana perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat mendakwa Silmy bersama sejumlah pejabat dan personel Ditjen Imigrasi melakukan pemerasan terhadap biro jasa pengurusan dokumen keimigrasian. Total penerimaan uang klik atau uang loket yang diungkap dalam dakwaan mencapai Rp168.972.869.091 sepanjang 2021–2026.

Jaksa menyebut, permintaan setoran bulanan kepada Silmy bermula sekitar Februari atau Maret 2023. Saat itu, Silmy disebut memerintahkan Bagus Bramantyo untuk meminta uang jatah setoran yang dikumpulkan guna memenuhi kebutuhannya. Bagus kemudian menemui Tessar Bayu Setyaji dan menyampaikan permintaan tersebut.

"Bahwa pada sekitar bulan Februari atau Maret 2023, Terdakwa memerintahkan Bagus Bramantyo untuk meminta uang jatah setoran uang yang dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhannya, selanjutnya Bagus Bramantyo menemui Tessar Bayu Setyaji di ruangannya dan menyampaikan permintaan uang dari Terdakwa sebesar Rp100.000.000 setiap bulannya," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan.

Tessar, menurut jaksa, memenuhi permintaan tersebut dengan memerintahkan Juniadi Sri Priambudi menyiapkan Rp25 juta setiap bulan. Kekurangannya dipenuhi dari bagian Subdirektorat Izin Tinggal. Setelah uang terkumpul, Bagus disebut mengambilnya secara tunai setiap bulan di ruangan Tessar.

"Dan atas permintaan tersebut Tessar Bayu Setyaji memenuhinya dengan memerintahkan Juniadi Sri Priambudi menyiapkan uang sebesar Rp25.000.000 setiap bulan dan sisanya akan disiapkan oleh bagian Subdit Izin Tinggal, yang setelah uang tersedia Bagus Bramantyo mengambilnya setiap bulan secara tunai di ruangan Tessar Bayu Setyaji," ujar jaksa.

Jaksa juga mengungkap cara uang tersebut dihimpun dan dibagikan. Uang klik atau uang loket yang masuk ke rekening penampungan dicairkan secara tunai oleh Juniadi, Gusti Benardiansyah alias Obin, Yohannes Sri Winarto, ataupun staf lainnya. Uang itu kemudian digabungkan, dihitung, dan dicatat dalam rekapitulasi yang memuat pembagian jatah bagi pejabat serta pimpinan.

"Beserta dengan rekap pembagian jatah untuk pejabat dan juga pimpinan dengan diberikan kode untuk setiap pejabat atau pihak yang untuk Terdakwa diberi kode 'malaikat'," kata jaksa.

Dugaan aliran uang tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan terhadap biro jasa yang mengurus dokumen keimigrasian WNA. Jaksa menguraikan, para terdakwa diduga mempersulit atau menunda persetujuan permohonan alih status izin tinggal, bahkan ketika biro jasa telah melengkapi persyaratan dan membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui aplikasi resmi.

Penundaan itu disebut dapat menyebabkan izin alih status tidak terbit hingga melewati batas waktu yang ditentukan. Akibatnya, WNA berisiko mengalami kelebihan masa tinggal atau overstay, dengan biaya yang ditanggung biro jasa. Kondisi tersebut diduga digunakan untuk mendorong biro jasa memberikan uang tambahan agar permohonan mereka diproses.

"Untuk mendapatkan Surat Alih Status, Biro jasa harus mengeluarkan uang klik atau uang loket," kata jaksa dalam dakwaannya.

Jaksa menyebut, dugaan pemerasan tersebut memperkaya Silmy sebesar Rp1,2 miliar. Sementara itu, Saffar Muhammad Godam disebut menerima Rp500 juta; Jaya Saputra Rp6.532.584.769; Tessar Bayu Setyaji Rp2.881.871.025; Bagus Bramantyo Rp4.245.542.862; Juniadi Sri Priambudi Rp16.307.366.374; serta Gusti Benardiansyah alias Obin Rp50.965.111.560.

Secara keseluruhan, penerimaan uang klik atau uang loket oleh Tessar, Bagus, Gusti, dan Juniadi selama 2021–2026 disebut mencapai Rp168,97 miliar. Jaksa mendakwa Silmy dan para terdakwa lainnya melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) KUHP.

Selain perkara pemerasan, Silmy juga diberitakan menghadapi dakwaan terkait dugaan gratifikasi. Namun, rincian perkara tersebut perlu diuraikan terpisah berdasarkan surat dakwaan agar tidak mencampuradukkan nilai penerimaan dan konstruksi hukum yang berbeda.

Tim kuasa hukum mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Pihak Silmy mempersoalkan pengaitan nilai dugaan pemerasan Rp168,9 miliar dengan perbuatan yang dituduhkan kepada kliennya. (tin,ist,jum/dya)

DENNY INDRAYANA WALK OUT
DARI SIDANG GUGATAN SK PENYETARAAN IJAZAH GIBRAN

Sidang gugatan Surat Keputusan (SK) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta diwarnai aksi walk out kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, Kamis (29/10/2026). Gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana itu mempersoalkan keputusan penyetaraan ijazah yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Penggugat meminta keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah karena diduga mengandung cacat substansi dan prosedur.

Gugatan SK Penyetaraan Ijazah Gibran

- **Pengadilan:** PTUN Jakarta
- **Nomor perkara:** 255/G/2026/PTUN.JKT
- **Penggugat:** PT Mercy Toga Kirana
- **Tergugat:** Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen
- **Objek sengketa:** SK Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang Penyetaraan Ijazah
- **Tanggal SK:** 6 Agustus 201

AKSI DI PERSIDANGAN

- Kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, melakukan walk out.
- Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menunjukkan salinan dokumen pendidikan Gibran.

5 TUNTUTAN UTAMA PENGGUGAT

- Mengabulkan gugatan seluruhnya.
- Membatalkan atau menyatakan tidak sah SK penyetaraan ijazah.
- Menyatakan SK cacat substansi dan prosedur serta bertentangan dengan AAUPB.
- Memerintahkan pencabutan SK dan penghapusan dari buku register negara paling lambat 60 hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Memerintahkan jawaban tertulis atas permohonan klarifikasi administratif dalam 30 hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

DALIL PENGGUGAT

- SK dinilai tidak didasarkan pada dokumen primer.
- Pejabat penerbit dituding tidak berwenang.
- Prosedur penerbitan disebut tidak memenuhi ketentuan format elektronik.
- Diduga melanggar asas kecermatan, keterbukaan, kepastian hukum, dan persamaan perlakuan.





Prof. Denny Indrayana saat walk out dari Persidangan Sengketa Ijazah Gibran Rakabuming Raka, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat, Kamis, 29 Oktober 2026. (Ist.Tangkap layar)

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT. Pihak yang digugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah.

Dalam petitumnya, penggugat meminta majelis hakim mengabulkan gugatan seluruhnya dan menyatakan SK tersebut batal atau tidak sah. Penggugat mendalilkan keputusan itu cacat substansi karena tidak didasarkan pada dokumen primer. Selain itu, keputusan tersebut dituding cacat prosedur karena disebut diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang dan tidak melalui format elektronik sebagaimana dipersyaratkan.

Penggugat juga menilai penerbitan keputusan tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), terutama asas kecermatan, keterbukaan, kepastian hukum, dan persamaan perlakuan.

Atas dasar itu, penggugat meminta tergugat mencabut SK tersebut secara total dan permanen serta menghapusnya dari buku register negara paling lambat 60 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Selain meminta pencabutan keputusan, penggugat menuntut jawaban tertulis yang resmi dan lengkap atas surat permohonan klarifikasi administratif tertanggal 11 Februari 2026. Jawaban tersebut diminta diberikan paling lambat 30 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Penggugat juga meminta seluruh biaya perkara dibebankan kepada tergugat.

Di tengah persidangan, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menunjukkan hasil pindai dokumen pendidikan Gibran dari jenjang SD hingga perguruan tinggi kepada majelis hakim dan awak media. Dokumen yang diperlihatkan meliputi ijazah SD dan SMP, Certificate of Attendance UTS Insearch, diploma The Management Development Institute of Singapore (MDIS), serta ijazah S1 University of Bradford.

"Kami sudah siap untuk membacakan dan memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dan juga kepada rekan-rekan media sebagai bentuk keterbukaan kami kepada seluruh rakyat Indonesia. Bahwa riwayat pendidikan dari Bapak Gibran Rakabuming kami sudah lampirkan dalam jawaban kami setebal 69 halaman. Ini jawabannya. Ini ada di halaman 50, ijazah SD-nya," ujar Rullyandi kepada wartawan, Kamis (29/10).

Rullyandi mengatakan dokumen tersebut telah diserahkan kepada majelis hakim, diunggah melalui sistem e-court, serta disampaikan secara fisik kepada penggugat dan tergugat. Ia juga menyatakan akan menghadirkan dokumen asli ijazah Gibran dalam persidangan berikutnya.

"Nanti akan kita hadirkan aslinya semua. Karena dalam hukum acara, semua yang asli itu harus dilampirkan. Wajib dilampirkan. Dan itu berkaitan dengan ijazah-ijazah, kami akan lampirkan semua aslinya. Nanti ada momennya kami akan tunjukkan semua aslinya," katanya.

Gugatan ini secara khusus mempersoalkan keabsahan keputusan administrasi tentang penyetaraan ijazah. Karena itu, dalil penggugat mengenai dasar dokumen dan prosedur penerbitan keputusan masih harus dibedakan dari dokumen riwayat pendidikan yang ditunjukkan pihak Gibran. Belum ada putusan akhir dalam bahan persidangan yang tersedia yang menyatakan SK Nomor 9149/D.D1/KS/2019 batal atau tidak sah.

Ajukan Pencabutan Gugatan

Denny Indrayana juga mengajukan pencabutan gugatan dan meninggalkan ruang sidang setelah pihaknya menilai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak menghadirkan dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan Gibran.

Denny menyatakan pencabutan gugatan dilakukan karena dokumen yang dinilai penting untuk menguji dasar penerbitan surat penyetaraan tidak kunjung dihadirkan oleh tergugat. Dokumen yang dipersoalkan antara lain Certificate of Attendance dari UTS Insearch, transkrip nilai terkait masa studi Gibran di Australia, dan bukti enrollment atau pendaftaran mahasiswa. Menurut Denny, dokumen-dokumen itu diperlukan untuk menguji dasar administratif penerbitan surat yang menjadi objek sengketa.

"Tergugat, entah dengan alasan apa, tidak kunjung menghadirkan bukti-bukti itu," kata

Denny dalam persidangan menyebut dokumen yang dimaksud pernah menjadi perhatian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Denny juga menilai dokumen tersebut semestinya dikuasai Kemendikdasmen sebagai pihak yang menerbitkan keputusan administrasi. Ia mengatakan pihaknya telah berupaya memperoleh bukti-bukti itu sejak proses persidangan di MK. Karena merasa dokumen yang diperlukan belum ditunjukkan, tim kuasa hukum kemudian menyerahkan surat pencabutan gugatan kepada majelis hakim.(wid,ist,kum/dya)

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan
TODAY

Perbaikan Jalan Pasar Gadang Ditarget Selesai 20 November

MALANG - Progres perbaikan Jalan Pasar Gadang dan Jalan Gadang-Bumiayu, Kota Malang dipercepat. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menargetkan pekerjaan tersebut rampung pada 20 November 2026. Diketahui batas akhir kontrak proyek sebenarnya pada 28 November 2026.

"Progres pekerjaannya sudah 82 persen. Targetnya sesuai arahan Pak Wali Kota kemarin, tanggal 20 November nanti harapannya selesai. Kami kejar itu. Kalau di kontraknya terakhir 28 November. Lebih cepat arahannya Pak Wali, untuk evaluasi," ujar Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Kota Malang, Kristian Bagus, dikonfirmasi melalui sambungan selular, Kamis (29/10/2026).

Dikatakannya, sejumlah pekerjaan masih harus diselesaikan pada kedua ruas jalan tersebut. Di Jalan Pasar Gadang, pekerjaan yang tersisa berada di sisi barat sepanjang sekitar 200 meter.

Sementara itu, di Jalan Gadang-Bumiayu, pekerjaan meliputi penggantian aspal di area jembatan pada sisi timur serta pengaspalan baru di sisi barat sepanjang sekitar 150 meter. Pembetonan di ruas tersebut juga belum sepenuhnya selesai karena masih menyisakan bagian sisi timur.

Bagus menjelaskan, percepatan pekerjaan terus diupayakan meski kondisi cuaca menjadi salah satu kendala. Terlebih beberapa hari terakhir, Kota Malang diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. "Kami juga berpacu dengan hujan. Tunggu sampai reda baru digelar lagi pekerjaannya," katanya.

Bagus menyebut, pekerjaan perbaikan jalan ini juga mencakup peninggian jalan sekitar 30 sentimeter. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi risiko banjir, didukung dengan keberadaan saluran air di sisi kanan dan kiri jalan.

Dalam hal ini, ia mengingatkan pedagang dan masyarakat agar menjaga kebersihan saluran dengan tidak membuang sampah sembarangan jika seluruh pekerjaan jalan telah rampung.

Menurutnya, sampah yang menyumbat saluran dapat menghambat aliran air, terlebih saat memasuki musim hujan. Ia menyebut persoalan tersebut juga menjadi perhatian Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi beberapa waktu lalu.



Kondisi proyek perbaikan jalan di kawasan Pasar Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Kamis (29/10/2026). (Santi/Lentera)

Terpisah, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan. "Kalau sementara ini pekerjaan di sisi selatan sudah selesai. Semuanya sesuai dengan koridor," katanya.

"Pekerjaannya sudah bagus. Karena ini kan Dana Alokasi Khusus (DAK) jalan dari pusat, maka harus berjalan sesuai koridor," imbuh Wahyu.

Namun ia mengimbau, agar aktivitas jual beli di kawasan pasar tersebut tidak lagi dilakukan di pinggir jalan setelah perbaikan rampung. Menurutnya, aktivitas perdagangan di tepi jalan berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas.

Untuk itu, di sepanjang ruas jalan juga akan dipasang pagar BRC dengan konstruksi precast yang berfungsi sebagai pembatas antara jalan dan area pertokoan.(Santi/Dya)

Kejar Target Akhir Tahun, Pajak Daerah Kabupaten Malang Masih Kurang Rp107,79 M



Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara. (foto: ist)

MALANG - Realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Malang mencapai Rp649,50 miliar per pekan keempat Oktober 2026. Angka tersebut setara 85,77 persen dari target Rp757,29 miliar sepanjang 2026. Artinya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang masih harus mengejar penerimaan sebesar Rp107,79 miliar hingga akhir tahun.

"Kami memang masih perlu mengoptimalkan penerimaan dari berbagai sektor dalam dua bulan terakhir 2026. Makanya program jemput bola melalui Bapenda Menyapa Warga (BMW) menjadi salah satu upaya yang dipastikan berlanjut hingga penghujung tahun," ujar Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara, Kamis (29/10/2026).

Dikatakannya, upaya optimalisasi penerimaan tetap diperlukan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Meskipun saat ini rata-rata seluruh sektor pajak telah mencatatkan realisasi di atas 80 persen.

"Bahkan, sektor reklame telah melampaui target yang telah ditetapkan," kata Made.

Menurutnya, penerimaan pajak reklame menjadi salah satu sektor yang telah memenuhi target, dengan realisasi Rp2,49 miliar atau 100,07 persen dari target Rp2,49 miliar. Capaian ini, kata Made, cukup menarik mengingat sektor reklame menghadapi tantangan pergeseran pemasangan iklan ke platform digital.

Selain reklame, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga mencatatkan realisasi tinggi, yakni Rp119,45 miliar atau 95,14 persen dari target Rp125,55 miliar. Menurut Made, capaian tersebut tidak terlepas dari program Bapenda Menyapa Warga (BMW) yang menyasar masyarakat secara langsung hingga tingkat desa.

"Kami akan tetap menggencarkan program BMW hingga akhir tahun," kata Made.

Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan/atau minuman turut mencatatkan penerimaan Rp20,45 miliar atau 92,88 persen dari target Rp22,01 miliar. Sementara itu, PBJT jasa kesenian dan hiburan mencapai Rp7,86 miliar atau 96,59 persen dari target Rp8,13 miliar.

Di tengah capaian tersebut, sejumlah sektor masih menyisakan pekerjaan rumah untuk mengejar target. PBJT jasa perhotelan, misalnya, baru terealisasi Rp6,97 miliar atau 84,31 persen dari target Rp8,27 miliar. Adapun penerimaan PBJT jasa parkir mencapai Rp1,28 miliar atau 80,72 persen dari target Rp1,58 miliar.

Penerimaan PBJT tenaga listrik tercatat Rp129,28 miliar atau 86,82 persen dari target Rp148,90 miliar. Sementara itu, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp163,67 miliar atau 80,80 persen dari target Rp202,57 miliar.

Dari sektor kendaraan bermotor, penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp136,97 miliar atau 83,03 persen dari target Rp164,96 miliar. Sedangkan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi Rp53,27 miliar atau 82,29 persen dari target Rp64,73 miliar.Adapun pajak air tanah telah mencapai Rp7 miliar atau 97,84 persen dari target Rp7,16 miliar. Sementara itu, penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tercatat Rp771,20 juta atau 88,56 persen dari target Rp870,82 juta.(Santi/Dya)

TAK HANYA INGGRIS,
32 NEGARA MINTA WARGA SIAPKAN STOK PANGAN

Imbauan pemerintah Inggris agar masyarakat menyimpan persediaan makanan dan air kini menjadi perhatian di berbagai negara. Kesiapsiagaan darurat meluas ke 33 negara di enam kawasan dunia. Stok yang dianjurkan disiapkan berkisar tiga hari hingga lebih dari sepekan. Ini untuk mengantisipasi perang, bencana alam, cuaca ekstrem, dan gangguan infrastruktur.

Puluhan negara lain kini juga memiliki panduan serupa. Mulai dari menyiapkan kebutuhan pokok selama tiga hari hingga persediaan untuk lebih dari sepekan.

Berdasarkan pemetaan Newsweek yang dikutip Kamis (29/10/2026), secara total.terdapat 33 negara dan wilayah di enam kawasan dunia yang memiliki panduan kesiapsiagaan terkait persediaan makanan atau perlengkapan darurat. Namun, tidak semua negara tersebut mengeluarkan imbauan baru secara bersamaan. Sebagian telah memiliki panduan kesiapsiagaan selama bertahun-tahun, sementara negara lainnya memperbarui anjuran seiring perkembangan risiko keamanan dan bencana.

Inggris dan Prancis termasuk negara yang kembali mengingatkan masyarakat untuk menyiapkan kebutuhan darurat. Pemerintah wilayah Normandia, Prancis, bahkan menyampaikan imbauan melalui media sosial pada Selasa (27/10/2026). "Jangan menunggu keadaan darurat terjadi. Bersiaplah sekarang!" demikian pernyataan pemerintah wilayah tersebut.

Imbauan ini bukan semata-mata berkaitan dengan kemungkinan perang. Pemerintah di berbagai negara juga memperhitungkan risiko cuaca ekstrem, banjir, badai, gempa bumi, pemadaman listrik, gangguan pasokan air, hingga serangan siber yang dapat melumpuhkan layanan penting. Dalam situasi seperti itu, distribusi kebutuhan pokok bisa terhambat dan bantuan tidak selalu dapat menjangkau seluruh masyarakat dengan segera.

Pemerintah Inggris meluncurkan kampanye Be Ready pada Oktober 2026. Melalui kampanye tersebut, masyarakat dianjurkan menyiapkan persediaan makanan tahan lama, air minum, dan kebutuhan dasar lain yang cukup untuk bertahan secara mandiri selama sedikitnya 72 jam atau tiga hari.


(Ilustrasi) Relawan Trussell (badan amal dan jaringan bank makanan) di Bradford Foodbank, Inggris. Dok

Perdana Menteri Inggris turut menyinggung persediaan makanan yang disimpannya di rumah saat berbicara dalam wawancara dengan BBC Radio. "Saya suka kacang-kacangan, jadi saya punya cukup banyak persediaannya di lemari, begitu juga sup. Saya pikir itulah jenis makanan yang akan saya sarankan untuk disimpan," katanya, sebagaimana dikutip Kompas.com dari Newsweek.

Kampanye tersebut sejalan dengan rekomendasi pemerintah Inggris untuk meningkatkan kesiapan rumah tangga menghadapi keadaan darurat yang dapat mengganggu layanan penting. Dalam laporan Reuters pada 23 Oktober 2026, pemerintah Inggris juga menyoroti ancaman serangan siber, cuaca ekstrem, kekeringan, dan kebakaran hutan sebagai bagian dari risiko yang perlu diantisipasi. Pemerintah mendorong masyarakat agar tidak hanya mengandalkan respons setelah krisis terjadi.


Warga belanja di pasar lokal Teheran, Iran pada 27 Oktober 2026 saat perang masih berkecamuk.dok

Prancis juga menyarankan masyarakat menyiapkan perlengkapan darurat untuk tiga hari. Panduan resmi otoritas keselamatan sipil Prancis mencantumkan air minum sebanyak enam liter per orang untuk persediaan darurat tersebut, makanan yang tidak mudah rusak, obat-obatan, perlengkapan pertolongan pertama, senter, radio dengan baterai cadangan, pengisi daya ponsel, pakaian hangat, uang tunai, serta salinan dokumen penting.

Pemerintah Prancis menjelaskan bahwa 72 jam pertama setelah bencana besar kerap menjadi periode yang paling sulit. Pasokan listrik, gas, dan air bersih dapat terputus, sementara jalan yang rusak atau tidak dapat dilalui berpotensi menghambat akses bantuan. Karena itu, persediaan darurat perlu ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau dan diperiksa secara berkala agar makanan, obat-obatan, serta baterai tetap layak digunakan.

Meski memiliki tujuan serupa, setiap negara menetapkan durasi persediaan yang berbeda. Jepang, Meksiko, Belanda, Kanada, Inggris, dan Prancis termasuk negara yang menganjurkan kesiapan kebutuhan dasar selama 72 jam.

Sejumlah negara lain menyarankan periode yang lebih panjang. Swedia dan Norwegia menganjurkan masyarakat menyiapkan persediaan untuk sekitar satu pekan, sedangkan Jerman menyarankan kebutuhan pokok yang cukup untuk bertahan hingga 10 hari. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa panduan kesiapsiagaan disesuaikan dengan pendekatan dan kebutuhan masing-masing negara.

Amerika Serikat juga memiliki panduan kesiapsiagaan melalui situs Ready.gov. Pemerintah AS menekankan pentingnya menyediakan makanan, air, dan kebutuhan pribadi untuk menghadapi keadaan darurat selama beberapa hari.

"Siap menghadapi keadaan darurat berarti memiliki makanan, air, dan persediaan lain milik sendiri yang cukup untuk beberapa hari," demikian panduan Ready.gov. (gus,rtr,cna,ist/dya)

DAFTAR NEGARA DAN WILAYAH SIAGA DARURAT

- **Eropa (17):** Inggris, Irlandia, Prancis, Jerman, Belanda, Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lithuania, Polandia, Republik Ceko, Austria, Swiss, dan Kroasia.
- **Amerika Utara (3):** Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
- **Amerika Selatan (4):** Chile, Kolombia, Argentina, dan Brasil.
- **Afrika (1):** Afrika Selatan.
- **Asia (6):** Jepang, Taiwan, Israel, India, Filipina, dan Singapura.
- **Oseania (2):** Selandia Baru dan Australia.

NEGARA-NEGARA YANG SEDANG BERPERANG

- **Rusia–Ukraina:** Perang skala penuh sejak invasi Rusia pada Februari 2022.
- **Israel–Palestina:** Konflik bersenjata di Jalur Gaza sejak Oktober 2023.
- **Israel–AS–Iran dan kelompok sekutunya:** Ketegangan militer dan serangan lintas negara, termasuk keterlibatan Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman.
- **Sudan:** Perang saudara antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) sejak April 2023.
- **Myanmar:** Konflik bersenjata antara junta militer, kelompok etnis bersenjata, dan pasukan pro-demokrasi sejak kudeta 2021.
- **Burkina Faso:** Konflik berkepanjangan melawan kelompok bersenjata ekstremis.
- **Suriah:** Konflik bersenjata yang berawal pada 2011 dan melibatkan berbagai faksi serta aktor asing.



HARIAN LENTERA TODAY
Inspirasi Perubahan

Buah untuk Kesehatan Kulit, Bantu Rawat Wajah Berjerawat

Jerawat menjadi salah satu masalah kulit yang dapat dialami pada berbagai usia. Selain menggunakan produk perawatan kulit yang sesuai, menjaga pola makan bergizi seimbang juga menjadi bagian penting dari upaya merawat kesehatan kulit.

Buah-buahan bisa menjadi pilihan untuk melengkapi kebutuhan nutrisi harian. Kandungan vitamin C, vitamin A, serat, dan berbagai senyawa antioksidan di dalamnya membantu mendukung fungsi tubuh, termasuk proses pembentukan kolagen dan perlindungan sel dari kerusakan.

Meski demikian, hubungan antara makanan dan jerawat tidak sesederhana mengonsumsi buah tertentu agar wajah kembali mulus. Jerawat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari produksi minyak berlebih, penyumbatan pori-pori, peradangan, perubahan hormon, hingga faktor genetik.

Lantas, buah apa saja yang dapat menjadi bagian dari pola makan untuk mendukung kesehatan kulit?

Pepaya

Pepaya mengandung vitamin C, karotenoid yang dapat diubah tubuh menjadi vitamin A, folat, serta serat. Vitamin C berperan dalam pembentukan kolagen, sedangkan vitamin A mendukung pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh.Pepaya juga mengandung enzim papain yang membantu memecah protein. Enzim ini dimanfaatkan dalam sejumlah formulasi perawatan kulit, tetapi manfaatnya ketika pepaya dimakan tidak sama dengan efek pemakaian bahan aktif secara langsung pada kulit.

Stroberi

Stroberi merupakan sumber vitamin C dan mengandung berbagai senyawa antioksidan. Vitamin C membantu pembentukan kolagen, sementara antioksidan berperan dalam melindungi sel dari stres oksidatif.Kandungan tersebut mendukung kesehatan tubuh dan kulit secara umum. Namun, stroberi tidak terbukti secara langsung menghilangkan jerawat maupun memudarkan bekasnya.

Lemon

Lemon dikenal memiliki kandungan vitamin C yang membantu pembentukan kolagen dan mendukung fungsi normal sistem kekebalan tubuh.Buah ini dapat menjadi pelengkap pola makan sehat, misalnya dengan menambahkan perasan lemon ke dalam air putih atau salad. Namun, belum ada bukti kuat bahwa mengonsumsi lemon secara khusus dapat menyembuhkan jerawat.Perlu diperhatikan, air lemon tidak disarankan untuk dioleskan langsung ke wajah.

Blueberry

Blueberry mengandung antosianin, yaitu kelompok senyawa yang memberikan warna biru keunguan pada buah tersebut. Buah ini juga menyediakan vitamin C dan serat.Antosianin memiliki aktivitas antioksidan yang membantu melindungi sel dari stres oksidatif.

Meski mekanisme ini relevan bagi kesehatan tubuh, bukti bahwa blueberry secara khusus mampu mengatasi jerawat masih terbatas.Blueberry dapat dinikmati secara langsung, dicampurkan ke dalam yoghurt, atau dijadikan pelengkap oatmeal saat sarapan.

Ceri

Ceri mengandung vitamin C, serat, dan berbagai senyawa polifenol yang memiliki aktivitas antioksidan.Nutrisi tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi harian dan mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Namun, belum terdapat bukti kuat bahwa ceri mempunyai efek khusus untuk mengobati jerawat.Jika ingin mengonsumsinya, pilih buah segar atau produk ceri tanpa tambahan gula berlebihan.

Jeruk

Jeruk merupakan sumber vitamin C yang mudah ditemukan. Vitamin ini berperan dalam pembentukan kolagen, membantu penyembuhan luka normal, dan mendukung fungsi kekebalan tubuh.Kecukupan vitamin C penting untuk menjaga fungsi jaringan kulit. Akan tetapi, konsumsi jeruk tidak secara otomatis menghilangkan jerawat atau bekas kehitaman yang ditinggalkannya.

Mengonsumsi jeruk secara langsung dapat menjadi pilihan untuk mendapatkan vitamin C sekaligus serat.

Semangka

Semangka memiliki kandungan air yang tinggi sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Buah ini juga mengandung likopen, yaitu pigmen karotenoid yang memberikan warna merah pada daging buah, serta sejumlah vitamin.

Hidrasi yang cukup mendukung fungsi normal tubuh, termasuk menjaga keseimbangan cairan. Sementara itu, likopen memiliki aktivitas antioksidan.

Meski demikian, semangka bukan obat untuk jerawat dan tidak terbukti secara khusus mengurangi produksi minyak wajah. Konsumsinya tetap bermanfaat sebagai bagian dari pola makan beragam, terutama ketika cuaca panas atau setelah beraktivitas.

Alpukat

Alpukat mengandung lemak tak jenuh, serat, vitamin E, dan folat. Vitamin E berperan sebagai antioksidan, sedangkan lemak tak jenuh merupakan bagian penting dari pola makan seimbang.

Nutrisi tersebut membantu mendukung kesehatan tubuh dan fungsi normal kulit. Namun, anggapan bahwa alpukat dapat langsung melembapkan kulit dari dalam atau menyembuhkan jerawat perlu disikapi secara hati-hati karena bukti klinisnya masih terbatas.(far,ist/dya)



Mobil Terbang dan Akhir Era Tesla

Roadster 2 menggabungkan kipas pengisap dan pendorong nitrogen bertekanan untuk menghasilkan kemampuan yang tak lazim bagi mobil listrik. Namun, legalitas, kesiapan teknologi, dan persaingan kendaraan listrik masih menjadi tantangan Tesla.

Tesla mendemonstrasikan kemampuan tak biasa Roadster 2 di fasilitas uji roket SpaceX dekat Waco, Texas, pada Kamis malam, 15 Oktober 2026. Mobil sport listrik itu melaju di lintasan, berputar, hingga melakukan pendaratan dengan bantuan semburan gas bertekanan tinggi. Demonstrasi tersebut menghidupkan kembali gagasan mobil terbang yang selama ini lebih sering hadir dalam fiksi ilmiah.

Kendaraan itu tidak dikemudikan langsung saat demonstrasi. Seluruh gerakannya dikendalikan dari jarak jauh karena sistem tangki nitrogen yang digunakan masih bersifat eksperimental. Elon Musk, bos Tesla sekaligus SpaceX, mengakui uji coba tersebut memiliki risiko kegagalan.

Roadster 2 pertama kali diumumkan pada 2017 dengan target produksi awal 2020. Namun, rencana tersebut berulang kali tertunda. Setelah demonstrasi pada Oktober 2026, Musk menyebut 2028 sebagai target produksi yang paling realistis. Artinya, penampilan publik itu belum menjadi tanda bahwa mobil siap dipasarkan.

Daya tarik utama Roadster 2 terletak pada dua teknologi, yakni sistem pengisap udara atau sucker system dan pendorong gas dingin (cold gas thrusters). Sistem pertama menggunakan empat kipas berkapasitas masing-masing 20 kilowatt di bagian bawah bodi. Kipas mengisap udara dari kolong mobil, sementara panel penyegel di sisi kendaraan membantu menghasilkan tekanan ke bawah.

Tesla mengklaim sistem itu mampu menciptakan gaya tekan lebih dari dua kali gravitasi bumi, bahkan pada kecepatan di bawah 80 kilometer per jam. Teknologi tersebut memungkinkan mobil menempel pada permukaan vertikal atau langit-langit. Prinsip serupa sebelumnya digunakan McMurtry Spéirling, supercar Inggris yang mengandalkan kipas untuk menghasilkan gaya tekan ke bawah.

Teknologi kedua memanfaatkan nitrogen bertekanan yang disemburkan melalui nosel untuk menghasilkan daya dorong. Dalam konfigurasi yang ditampilkan saat demonstrasi, Roadster 2 menggunakan tangki nitrogen berkapasitas 600 liter dan enam pendorong tambahan. Sistem ini membuat mobil dapat melakukan manuver yang tidak mungkin dilakukan mobil konvensional.

Tesla merencanakan tiga varian Roadster 2. Model Performance ditargetkan berakselerasi dari nol hingga 60 mil per jam dalam 1,6 detik. Model Thrust, yang dilengkapi empat pendorong, diklaim mencapai kecepatan tersebut dalam 0,85 detik. Adapun Model Rocket merupakan varian demonstrasi dengan konfigurasi pendorong lebih lengkap, tetapi hanya tersedia melalui undangan dan tidak legal digunakan di jalan umum.

Di luar kemampuan teknisnya, Roadster 2 menghadapi persoalan regulasi. Otoritas penerbangan Amerika Serikat (FAA) menyatakan kendaraan itu tidak memenuhi definisi pesawat terbang. Namun, sejumlah pakar mengingatkan bahwa yurisdiksi FAA dapat mencakup mesin yang mampu lepas landas. Sertifikasi diperkirakan memerlukan waktu setidaknya satu tahun, dan pengemudi mungkin perlu memiliki lisensi penerbangan rekreasi.

Keraguan juga muncul dari sisi bisnis. Analis Wall Street Dan Ives menilai Roadster 2 tidak akan banyak memengaruhi volume penjualan maupun pendapatan Tesla, meski dapat meningkatkan citra kemampuan rekayasa perusahaan. Sementara itu, Alef Aeronautics, perusahaan rintisan California yang mengembangkan mobil terbang dengan delapan propeler listrik, telah memperoleh sertifikat khusus untuk keperluan pameran, riset, dan pengembangan.

Demonstrasi Roadster 2 juga berlangsung ketika persaingan mobil listrik semakin ketat. Pada 2025, tujuh dari sepuluh perusahaan mobil listrik terbesar dunia berasal dari China. Data yang dikutip dalam laporan Tirto menempatkan BYD dengan pangsa pasar 19 persen, sedangkan Tesla 7,8 persen.

Roadster 2 bukan sekadar pameran teknologi. Kendaraan ini juga memunculkan pertanyaan tentang arah bisnis Tesla. Apakah perusahaan masih akan berfokus pada mobil listrik yang dikendarai manusia atau semakin mengalihkan perhatian ke kendaraan otonom dan teknologi eksperimental? Untuk saat ini, kemampuan Roadster 2 masih harus diuji lebih jauh sebelum dapat dinilai sebagai terobosan transportasi yang siap digunakan sehari-hari.(far,ist/dya)



HARIAN LENTERA Inspirasi Perubahan TODAY

HARIAN **"LENTERA TODAY"**
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA,MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO **I SIDOARJO:** TEGUH A **I GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) **I MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH **I LAMONGAN:** L HANDI **I BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA **I KEDIRI:** AIS **I JOMBANG :** SUTONO **I PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO **I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO **I MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) **I MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. **I TRENGGALEK:** HERLAMBANG **I MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN **I NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO **I DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN **I LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN **I PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

MEDIA TERVERIFIKASI

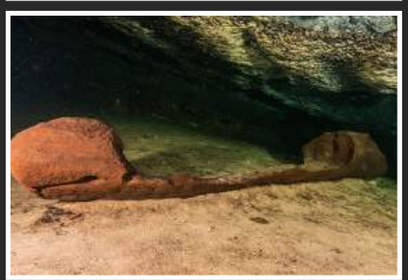
PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH **I MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN **I SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN,FADHILA **I ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26,JL TENGGILIS TENGAH 4 **I TELP** 03187854491 **I PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA **I ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA **I TELP IKLAN** 031-87854491 **I NIB** 91205006801134 **I HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.



Sac Actun, Labirin Bawah Air Meksiko Simpan Jejak Peradaban Maya







Sistem gua sepanjang ratusan kilometer di Semenanjung Yucatán ini menawarkan lanskap bawah air yang menakjubkan. Di balik keindahannya, Sac Actun menyimpan artefak kuno, sisa fauna purba, dan risiko eksplorasi yang tidak bisa diremehkan.Di bawah Semenanjung Yucatán, Meksiko, terdapat dunia yang nyaris tak tersentuh cahaya matahari. Lorong-lorong batu kapur membentang di bawah tanah, terisi air dan terhubung dengan lubang-lubang alami yang dikenal sebagai cenote. Di dalamnya, sisa-sisa kehidupan dari ribuan tahun silam tersimpan bersama jejak peradaban Maya.

Sistem gua itu bernama Sac Actun, yang dalam bahasa Maya berarti Gua Putih. Berada di negara bagian Quintana Roo, kawasan ini dikenal sebagai sistem gua bawah air terpanjang di dunia. Pada 2018, para peneliti memastikan hubungan antara Sac Actun dan sistem Dos Ojos, menghasilkan jaringan gua tergenang sepanjang 347 kilometer.

Lorong Waktu di Bawah Yucatán

Penemuan hubungan Sac Actun dan Dos Ojos diumumkan pada Januari 2018 setelah tim eksplorasi bawah air dari proyek Gran Acuífero Maya (GAM) melakukan penelitian selama sekitar 10 bulan. Tim menemukan bahwa kedua sistem gua yang sebelumnya dipetakan secara terpisah ternyata tersambung.

Sebelum penyatuan tersebut, Sac Actun diketahui memiliki panjang sekitar 263 kilometer, sedangkan Dos Ojos sekitar 83 kilometer. Keduanya kemudian dipahami sebagai satu sistem yang membentang sepanjang 347 kilometer.

Penelitian ini bukan pekerjaan singkat. Robert Schmittner, pemimpin eksplorasi bawah air GAM, telah mencari hubungan antarlorong gua selama bertahun-tahun. Pemetaan dilakukan dengan menyusuri jaringan terowongan yang rumit, sebagian berada jauh di bawah permukaan tanah.Dalam laporan The Guardian pada 17 Januari 2018, penemuan tersebut dinilai berpotensi membantu peneliti memahami perkembangan peradaban Maya. Jaringan gua ini juga memperlihatkan hubungan antara kondisi geologi, sumber air bawah tanah, dan kehidupan manusia di kawasan Yucatán.

Fauna yang Telah Punah

Sac Actun bukan sekadar bentang alam bawah air. Di dalamnya, para peneliti menemukan berbagai peninggalan yang membantu merekonstruksi kehidupan manusia pada masa lampau.

Kementerian Kebudayaan Meksiko melalui Institut Nasional Antropologi dan Sejarah (INAH) melaporkan pada Februari 2018 bahwa kawasan penelitian Sac Actun mencakup 248 cenote dan 198 konteks arkeologi. Temuan tersebut mencakup tulang fauna dari kala Pleistosen, termasuk gonfoterium--kerabat gajah purba--kungkang raksasa, serta beruang.

Selain sisa fauna, peneliti menemukan keramik, tulang manusia, makam Maya, dan benda-benda yang berkaitan dengan aktivitas ritual. Sejumlah temuan memperlihatkan bahwa gua dan cenote memiliki arti penting bagi masyarakat Maya, baik sebagai sumber air maupun ruang yang berhubungan dengan kepercayaan mereka.

Arkeolog bawah air Guillermo de Anda, yang memimpin proyek GAM, menjelaskan bahwa kawasan ini menyimpan lebih dari seratus konteks arkeologi. Dalam laporan National Geographic pada Februari 2018, ia menyebut Sac Actun sebagai salah satu situs arkeologi bawah air terpenting karena memuat bukti kehidupan manusia awal di Amerika, fauna yang telah punah, dan kebudayaan Maya.

Peneliti juga menemukan bukti yang mengindikasikan keberadaan manusia di kawasan tersebut ribuan tahun sebelum masa kejayaan peradaban Maya.

Salah satu kerangka manusia yang ditemukan di sistem gua kawasan Yucatán diperkirakan berusia sekitar 9.000 tahun, meskipun penentuan usia dan konteks setiap temuan memerlukan penelitian tersendiri.Bagi masyarakat Maya, cenote dan gua tertentu diyakini memiliki makna sakral.

Pintu Masuk ke Dunia Bawah Air

Secara geologis, Sac Actun terbentuk dalam lanskap batu kapur Semenanjung Yucatán. Air yang meresap ke dalam batuan selama rentang waktu panjang melarutkan material tersebut, membentuk rongga, lorong, dan jaringan bawah tanah yang kompleks.

Cenote merupakan lubang alami yang membuka akses menuju sebagian jaringan ini.

Beberapa cenote memperlihatkan air berwarna biru jernih, sementara bagian lainnya menjadi pintu masuk menuju lorong yang gelap dan sempit.

Keunikan sistem tersebut juga terletak pada perubahan lingkungan selama ribuan tahun. Naik-turunnya permukaan laut dan perubahan muka air tanah membuat sebagian lorong yang dahulu kering kemudian terendam. Kondisi ini membantu melestarikan sisa-sisa manusia dan hewan purba, sekaligus menyimpan petunjuk tentang perubahan iklim masa lampau.(far,ist/dya)

20 Korporasi Tersangka ...dari Hal 1

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tersangka tersebut dalam konferensi pers di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (29/10/2026). Empat perusahaan bermodal asing itu adalah PT HKI dan PT AI yang terkait dengan Singapura, PT RKA dengan Malaysia, serta PT API dengan Korea Selatan. Sebanyak 16 korporasi lainnya merupakan perusahaan penanaman modal dalam negeri.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa 80 persen korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan perusahaan bermodal dalam negeri. Namun, asal penanaman modal tidak otomatis menunjukkan kewarganegaraan pemilik akhir ataupun pihak yang mengendalikan keputusan operasional perusahaan.

Secara keseluruhan, Bareskrim menangani 104 laporan polisi terkait dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla, dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare. Dari penanganan perkara tersebut, 20 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka. Polri menyatakan penyidikan dilakukan melalui pendekatan Scientific Crime Investigation untuk memperkuat pembuktian dan mengungkap pihak yang bertanggung jawab.

"Jumlah tersangka korporasi akan terus berkembang sejalan dengan proses-proses penyidikan yang sedang kami laksanakan," kata Asep.

Di luar perkara korporasi, polisi mencatat 287 laporan terkait dugaan tindak pidana karhutla yang melibatkan perorangan, dengan luas lahan terbakar 5.859,12 hektare. Sebanyak 245 orang ditetapkan sebagai tersangka perorangan. Dengan demikian, penanganan perkara yang diumumkan Bareskrim mencakup 245 tersangka perorangan dan 20 korporasi.

Bareskrim juga memaparkan sebaran 97 laporan polisi terkait perkara karhutla yang melibatkan korporasi dan telah memasuki tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan penuntutan. Kalimantan Barat mencatat 33 laporan, Sumatera Selatan 20 laporan, Kalimantan Tengah 14 laporan, Kalimantan Selatan 13 laporan, dan Kalimantan Timur tujuh laporan. Rincian tersebut mencakup 87 laporan, sementara 10 laporan lainnya tidak dirinci dalam pemberitaan tersebut.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menyatakan pemerintah juga menelusuri pertanggungjawaban hingga penerima manfaat atau beneficial owner.

Dalam keterangan resmi pada Kamis (29/10/2026), ia menyebut temuan dugaan pelanggaran perizinan dan alat bukti terus dikembangkan untuk mengejar pihak yang memperoleh manfaat dari peristiwa kebakaran di areal konsesi.

Kementerian juga membuka kemungkinan menuntut ganti kerugian atas kerusakan hutan apabila hasil pemeriksaan menemukan dasar pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan.

"Tidak menutup kemungkinan, selain penerapan sanksi administratif maupun proses pidana yang diterapkan, ditempuh pula upaya penuntutan ganti kerugian atas kerusakan hutan apabila dalam hasil pemeriksaan terdapat dasar pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian pernyataan Dwi.

23 Korporasi Diusulkan Dicabut Izinnya

Selain menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka, Bareskrim Polri merekomendasikan pencabutan izin terhadap 23 perusahaan yang diduga terkait karhutla. Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan rekomendasi tersebut didasarkan pada hasil penyelidikan dan sejumlah indikator pelanggaran.

"Kami merekomendasikan pencabutan izin terhadap 23 korporasi. Rekomendasi tersebut didasarkan pada hasil penyelidikan dan sejumlah indikator," kata Asep.

Menurut Asep, salah satu indikatornya adalah kebakaran yang berulang kali terjadi di wilayah konsesi perusahaan. Polisi juga menemukan bukti bahwa sumber api berasal dari area konsesi sejumlah perusahaan tersebut.

"Ketiga, sarana dan prasarana pencegahan serta penanggulangan kebakaran tidak memadai. Keempat, luas lahan terbakar melebihi 500 hektare," ujar Asep.

Dengan demikian, indikator yang digunakan Polri meliputi kebakaran berulang di wilayah perusahaan, sumber api yang berasal dari dalam area konsesi, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang tidak memadai, serta luas lahan terbakar lebih dari 500 hektare.

Ancaman Pidana Korporasi-Perorangan

Dalam penanganan perkara korporasi, Asep menyebut perusahaan-perusahaan tersebut disangkakan melanggar Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3); Pasal 99 ayat (1), (2), dan (3); serta Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Di mana di dalam Pasal persangkaan tersebut melanggar hak sengaja ataupun lalai yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup serta pembakaran lahan," ucap Asep.

"Ancaman pidananya dari paling rendah 3 tahun penjara hingga paling tinggi 5 tahun penjara, serta denda paling rendah Rp3 miliar, paling tinggi Rp15 miliar," sambungnya.

Selain mengusut korporasi, Bareskrim Polri menetapkan 245 orang sebagai tersangka dari 287 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 5.859,12 hektare. Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan modus operandi para tersangka antara lain membuka lahan dengan cara membakar, baik secara sengaja maupun akibat kelalaian hingga memicu kebakaran hutan.

"Modus operandi para tersangka antara lain membuka lahan dengan cara membakar, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, hingga menyebabkan kebakaran hutan," kata Asep.

Sebaran laporan polisi menunjukkan Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan jumlah laporan terbanyak, yakni 68 laporan. Berikutnya Riau dengan 59 laporan, Kalimantan Tengah 43 laporan, Sumatera Selatan 42 laporan, dan Kalimantan Timur 30 laporan. Data ini menunjukkan penanganan karhutla melibatkan sejumlah wilayah dengan karakteristik lahan dan risiko kebakaran yang berbeda.

Asep mengatakan para tersangka akan dijerat dengan pasal sesuai perbuatan dan unsur pidana yang ditemukan penyidik. Sebagian di antaranya berpotensi dijerat Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Penyidik juga dapat menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 69 mengatur larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, dengan pengecualian terbatas yang diatur undang-undang. Sementara itu, Pasal 108 mengatur ancaman pidana bagi pelanggaran larangan pembakaran lahan berupa penjara tiga hingga 10 tahun dan denda Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.

DPR Minta Menjangkau Pengendali

Penetapan tersangka korporasi tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi III DPR Moh. Rano Alfath. Ia mengapresiasi langkah Polri mengusut dugaan keterlibatan perusahaan, termasuk empat perusahaan bermodal asing. Menurut Rano, penyidik perlu mendalami struktur pengendalian perusahaan serta pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan operasionalnya.

245 TERSANGKA PERORANGAN KASUS KARHUTLA

DATA PENANGANAN POLRI

- **245 orang** ditetapkan sebagai tersangka.
- **287 laporan polisi** terkait karhutla.
- **5.859,12 hektare** luas lahan terbakar dalam perkara perorangan.
- **Modus dugaan:** membuka lahan dengan cara membakar, baik secara sengaja maupun akibat kelalaian.

SEBARAN LAPORAN POLISI TERBANYAK

- Kalimantan Barat: **68 laporan**
- Riau: **59 laporan**
- Kalimantan Tengah: **43 laporan**
- Sumatera Selatan: **42 laporan**
- Kalimantan Timur: **30 laporan**

ANCAMAN HUKUMAN

- **UU Perkebunan**
  Pasal 108 UU No. 39 Tahun 2014Penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.
- **UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**
  Pasal 69 dan 108 UU No. 32 Tahun 2009 Ancaman penjara 3–10 tahun dan denda Rp3 miliar–Rp10 miliar, sesuai pasal yang diterapkan.
- **UU Kehutanan**
  Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999Penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.



Ia juga mendukung penelusuran terhadap pengurus, pemberi perintah, pengambil keputusan, dan pihak yang memperoleh manfaat apabila ditemukan bukti keterlibatan.

"Perusahaan dalam negeri maupun perusahaan dengan modal asing memiliki kewajiban yang sama untuk menaati hukum Indonesia. Investasi harus membawa manfaat bagi masyarakat dan disertai tanggung jawab terhadap lingkungan. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus tegas, profesional, dan berdasarkan bukti," ujar Rano, pada Kamis (29/10/2026).

Dukungan serupa datang dari anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan. Ia menilai penetapan 20 korporasi sebagai tersangka merupakan perkembangan penting karena penanganan karhutla tidak semestinya berhenti pada pemadaman api dan sanksi administratif.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran, menurut dia, perlu berjalan seiring dengan penghitungan kerugian lingkungan dan pemulihan kawasan terdampak. (wid,ant,kum,bbc/dya)

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan
TODAY

BAHLIL DUGA SINGAPURA JUAL LAGI GAS RI KE NEGARA LAIN

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menduga sebagian gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) yang diekspor Indonesia ke Singapura dijual kembali ke negara lain. Menurut dia, tidak seluruh LNG yang dikirim Indonesia digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik Negeri Singa itu.

Bahlil menyampaikan dugaan tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Dalam kesempatan itu, ia memaparkan data pengiriman gas Indonesia ke Singapura, termasuk 148 kargo LNG yang disebut setara dengan volume 1.480 MM. Namun, ia tidak merinci periode pengiriman, satuan lengkap angka tersebut, maupun besaran gas yang diduga diper-dagangkan kembali oleh Singapura.

"148 kargo itu setara dengan 1.480 MM. Itu yang kita kirim. Tapi keyakinan saya bahwa pengiriman 148 kargo itu tidak semuanya itu dipakai untuk kepentingan Singapura, tapi sebagian dijadikan sebagai trading, untuk kemudian diekspor lagi ke negara lain. Tapi ada sebagian pasti untuk konsumsi mereka," ujar Bahlil.

Pernyataan itu merupakan dugaan Bahlil, bukan bukti terverifikasi bahwa Singapura telah menjual kembali LNG Indonesia. Dalam keterangan yang disampaikan, belum ada rincian mengenai negara tujuan penjualan kembali, volume LNG yang diperdagangkan, ataupun transaksi yang menjadi dasar dugaan tersebut.

Meski demikian, pemerintah belum berencana memangkas ekspor LNG ke Singapura. Bahlil mengatakan kebutuhan LNG dalam negeri Indonesia masih mencukupi sehingga ekspor tetap dapat dilakukan. Pemerintah akan melihat perkembangan ke-butuhan domestik sebelum menentu-kan langkah selanjutnya.


Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia

"Nanti kita lihat perkembangannya lah, ya. Kan kita harus memprioritas-kan kepentingan domestik kita, tapi kalau domestik kita sudah cukup, saya pikir kita harus juga mengirim ekspor ke negara lain," kata Bahlil.

Pemangkasan Tak Langgar Kontrak

Di luar persoalan LNG, Bahlil menjelaskan pengurangan sebagian ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura. Ia menyebut total ekspor gas pipa mencapai 409,55 juta kaki kubik standar per hari (million standard cubic feet per day atau MMSCFD). Pasokan tersebut berasal dari dua wilayah, yakni Laut Natuna dan Sumatera.

Dari jumlah itu, pemerintah mengurangi pasokan sekitar 31 MMSCFD. Bahlil menyebut pengurangan tersebut setara sekitar 8 persen dari total ekspor gas pipa yang dimaksud. Menurut dia, kebijakan tersebut tidak melanggar kontrak karena volume yang dikirim masih berada di atas batas minimum yang disepakati.

"Nah, sekarang ini kan yang kita lakukan pemotongan sebagian itu kan adalah 31 MM dari total 409 MM dari kontrak yang ada. Dengan yang ada itu, kita belum melanggar kontrak karena ada batas minimum, kan? Batas minimum itu belum kita lampaui. Jadi nggak ada masalah, ya," ujarnya.

Berdasarkan perhitungan dari angka yang disampaikan, pengurangan 31 MMSCFD dari 409,55 MMSCFD setara sekitar 7,57 persen. Angka itu mendekati 8 persen sebagaimana disebutkan Bahlil. Meski begitu, penilaian mengenai kepatuhan terhadap kontrak tetap perlu merujuk pada dokumen perjanjian, khususnya ketentuan volume minimum dan mekanisme penyesuaian pasokan.

Data gas pipa tersebut perlu dibedakan dari angka pengiriman LNG yang disampaikan Bahlil. Gas pipa disalurkan melalui jaringan pipa, sedangkan LNG merupakan gas yang dicairkan untuk memudahkan penyimpanan dan pengangkutan, termasuk menggunakan kapal. Karena itu, angka 409,55 MMSCFD untuk gas pipa dan angka 1.480 MM yang dikaitkan dengan 148 kargo LNG tidak dapat langsung dibandingkan atau dijumlahkan tanpa kejelasan satuan, periode, dan dasar perhitungannya. (wid,ist,rls/dya)

PERKEMBANGAN NILAI EKSPOR

2021
US$ 2,22 miliar

2022
US$ 3,02 miliar

2023
US$ 2,26 miliar

2024
US$ 2,22 miliar

2025
US$ 1,66-US$ 1,73 miliar

KEBIJAKAN PEMANGKASAN DI 2026

- **Pemerintah Indonesia memangkas ekspor gas pipa ke Singapura sebesar 31 BBTUD (juta kaki kubik standar per hari) mulai 24 Oktober 2026.**
- **Pemotongan volume pasokan ini dilakukan melalui dua jalur pipa utama:**

- Jalur Natuna (Pipa WNTS):
Dikurangi sebesar 15 BBTUD untuk dialihkan ke PT PLN Batam.

- Jalur Sumatra (Pipa TGI):
Dikurangi sebesar 16 BBTUD (termasuk dari Blok Jambi Merang) untuk menopang kebutuhan listrik di Sumatra, Batam, dan Bintan.



Impor BBM-LPG Lewat Lemigas

PEMERINTAH mengganti mekanisme pengadaan impor minyak mentah (crude), bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) dari luar negeri. Mekanisme diubah dari awalnya tender antar badan usaha (business-to-business/b-to-b) kini dilakukan lewat kerja sama langsung antar pemerintah (government-to-government/g-to-g) ataupun skema pemerintah dengan badan usaha (government-to-business/g-to-b).

Dalam hal ini, kini pengadaan impor tersebut tidak lagi dilakukan oleh Pertamina. Melainkan langsung dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU). Adapun BLU yang dimaksud adalah Lemigas, skema baru itu diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan proses ini akan membuat pengadaan energi jadi lebih mudah dan cepat. Pasalnya, kini negara yang bakal maju melakukan proses impor dan negosiasi. Dia menyinggung tidak ada lagi proses pengadaan menggunakan perusahaan cangkang.

"Jadi nggak ada lagi perusahaan-perusahaan cangkang yang 30 lebih itu, nggak ada lagi. Jadi sekarang pemerintah langsung melakukan lobi, deal dengan negara lain yang mempunyai sumber energi," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (29/10/2026).

"Dengan demikian, saya yakinkan bahwa ini memangkas prosedur yang begitu panjang, kemudian kita bisa melakukan kontrak jangka panjang," sambungnya.

Pria yang juga menjabat Menteri ESDM itu mengatakan langkah ini juga bisa menjadi pemulus komunikasi bilateral antar negara, termasuk dalam pembahasan kerja sama perdagangan.

"Dan yang ketiga, ini menjadi alat komunikasi dalam konteks bilateral antara negara-negara, ya. Ya contoh kalau katakan lah kita membeli LPG dari Amerika, dan memang selama ini, ya silakan. Itu yang nanti negara akan melakukan komunikasi dengan Amerika," terang Bahlil.

Ketika ditanya apakah proses pengadaan energi dengan Lemigas bisa membuat Indonesia mendapatkan produk yang lebih murah, dia enggan bicara banyak.

"Itu kamu yang bilang, ya," katanya singkat ketika ditanya perihal harga yang lebih murah.(tin rls/dya)